

Analisis Kritis Terhadap Implementasi Pendidikan Karakter di Indonesia: Mengapa Sekolah Gagal Membentuk Moralitas?

Bariroh Barid*, Eko Handoyo, Fathur Rokhman

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: barirohbarid@students.unnes.ac.id*, eko.handoyo@mail.unnes.ac.id,
fathurrokhman@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Pendidikan karakter telah ditetapkan sebagai mandat fundamental dan pilar strategis dalam arsitektur sistem pendidikan nasional Indonesia, yang secara operasional diwujudkan melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan integrasi Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. Meskipun kerangka regulasi telah disusun secara komprehensif, realitas empiris di lapangan memperlihatkan adanya paradoks yang mencolok antara idealisme kebijakan dengan outcome perilaku peserta didik. Eskalasi fenomena degradasi moral yang semakin variatif, mulai dari perundungan fisik dan siber (cyberbullying), tawuran yang berevolusi menjadi kriminalitas terorganisir, hingga perilaku koruptif yang melibatkan kaum terpelajar, mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam proses internalisasi nilai di institusi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif bukti-bukti empiris kegagalan pendidikan karakter dan menganalisis faktor determinan penyebabnya melalui pendekatan manajemen pendidikan. Penelitian ini mengadopsi metode studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dokumen laporan resmi pemerintah, hasil survei berskala nasional maupun internasional, serta literatur ilmiah yang relevan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kegagalan pendidikan karakter di Indonesia terkonfirmasi oleh stagnasi skor PISA pada domain iklim sekolah dan kedisiplinan, lonjakan drastis angka kekerasan anak berdasarkan data KPAI dan FSGI, serta stagnasi Indeks Persepsi Korupsi yang mencerminkan rapuhnya integritas publik. Analisis kausalitas menunjukkan bahwa kegagalan ini bukan peristiwa tunggal, melainkan akibat dari dominasi hegemoni aspek kognitif dalam sistem evaluasi pembelajaran, ketidaksiapan kompetensi dan mentalitas guru sebagai figur teladan (role model) akibat beban administratif, serta adanya disonansi nilai yang tajam antara narasi sekolah dengan realitas sosial dan lingkungan keluarga.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Degradasi Moral, Evaluasi Pendidikan, Manajemen Sekolah, Profil Pelajar Pancasila.

Abstract

Character education stands as a fundamental mandate and strategic pillar within the architecture of Indonesia's national education system, operationally realized through the Strengthening Character Education (PPK) program and the integration of the Pancasila Student Profile within the Merdeka Curriculum. Although the regulatory framework has been comprehensively structured, empirical reality on the ground reveals a striking paradox between policy ideals and student behavioral outcomes. The escalation of moral degradation phenomena, which are becoming increasingly varied—ranging from physical and cyberbullying, student brawls evolving into organized crime, to corrupt behavior involving educated individuals—indicates a systemic failure in the value internalization process within educational institutions. This study aims to comprehensively describe empirical evidence of character education failure and analyze its determinant factors through an educational management and critical sociology approach. This study adopts a literature review method by examining official government report documents, national and international survey results, and relevant scientific literature. The findings reveal that the failure of character education in Indonesia is confirmed by stagnant PISA scores in the school climate and discipline domains, a drastic spike in child violence rates based on KPAI and FSGI data, and the stagnation of the Corruption Perception Index, reflecting the fragility of public integrity. Causal analysis suggests that this failure is not a singular event but a result of the hegemony of cognitive aspects in the learning evaluation system, the unpreparedness of teachers' competence and mentality as role models due to administrative burdens, and a sharp value dissonance between school narratives and social or family realities.

Keywords: Character Education, Moral Degradation, Educational Evaluation, School Management, Pancasila Student Profile.

*Correspondence Author: Bariroh Barid
Email: barirohbarid@students.unnes.ac.id



PENDAHULUAN

Pendidikan tidak pernah sekadar dimaknai sebagai proses transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan sebuah upaya kebudayaan untuk mentransformasi nilai dan membentuk peradaban (*transfer of values*) (Hadijaya et al., 2025; Muhammad & Amril, 2024; Novianti, 2022; Rahmawati, 2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit dan filosofis menegaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mandat filosofis ini kemudian diterjemahkan secara lebih operasional melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Regulasi ini menempatkan sekolah sebagai institusi sentral atau benteng utama dalam pembentukan moralitas peserta didik, dengan harapan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara etika dan spiritual.

Namun, dinamika organisasi pendidikan tidak berjalan di ruang hampa. Sebagaimana dijelaskan oleh Hirsch dan Desoucey (2006), setiap entitas organisasi termasuk sekolah, selalu dihadapkan pada tuntutan untuk melakukan adaptasi (*organizational adaptation*) terhadap perubahan lingkungan eksternal yang bergerak cepat. Dalam konteks Indonesia, institusi pendidikan tampak mengalami guncangan hebat dan kewalahan dalam merespons arus perubahan sosial, budaya digital, dan pergeseran nilai masyarakat yang kontra produktif terhadap pembentukan karakter. Meskipun kurikulum pendidikan telah mengalami berbagai transformasi dan penyempurnaan, mulai dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, hingga yang terbaru Kurikulum Merdeka dengan ikon Profil Pelajar Pancasila, bukti-bukti empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang semakin lebar antara tujuan ideal pendidikan dengan realitas output karakter siswa.

Data statistik dari berbagai lembaga memberikan sinyal bahaya (*red flag*) yang tidak bisa diabaikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara konsisten melaporkan tingginya angka kekerasan yang melibatkan pelajar, baik sebagai pelaku maupun korban. Demikian pula hasil asesmen internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA) yang tidak hanya memotret rendahnya skor literasi dan numerasi, tetapi juga menyajikan buruknya iklim kedisiplinan (*disciplinary climate*) dan kesejahteraan psikososial siswa di sekolah-sekolah Indonesia (OECD, 2019). Sekolah yang seharusnya menjadi zona aman (*safe zone*) dan inkubator kebajikan, justru sering kali bermetamorfosis menjadi arena reproduksi kekerasan dan perundungan.

Kegagalan implementasi pendidikan karakter ini tidak dapat disederhanakan hanya sebagai isu pedagogis atau kesalahan guru semata di dalam kelas. Lebih jauh dari itu, fenomena ini merefleksikan masalah manajemen pendidikan yang fundamental dan struktural. Beer dan Nohria (2000) dalam studi klasik mereka tentang manajemen perubahan mengingatkan bahwa sebagian besar inisiatif perubahan (sekitar 70%) berakhir dengan kegagalan bukan karena idenya yang buruk, melainkan karena ketidakmampuan organisasi dalam membangun budaya yang mendukung perubahan tersebut.

Kegagalan implementasi pendidikan karakter ini tidak dapat disederhanakan hanya sebagai isu pedagogis atau kesalahan guru semata di dalam kelas. Lebih jauh dari itu, fenomena ini merefleksikan masalah manajemen pendidikan yang fundamental dan struktural. Beer dan

Nohria (2000) dalam studi klasik mereka tentang manajemen perubahan mengingatkan bahwa sebagian besar inisiatif perubahan (sekitar 70%) berakhir dengan kegagalan bukan karena idenya yang buruk, melainkan karena ketidakmampuan organisasi dalam membangun budaya yang mendukung perubahan tersebut. Dalam konteks sekolah di Indonesia, pendidikan karakter sering kali tereduksi menjadi formalitas administratif, hafalan konsep moral dalam mata pelajaran PPKn atau Agama, tanpa adanya strategi internalisasi perilaku yang sistematis dan terukur. Pendidikan karakter terjebak dalam dokumen kurikulum, namun gagal melekat dalam perilaku keseharian siswa.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami secara kritis dan mendalam mengapa kebijakan pendidikan karakter yang telah dirancang dengan baik ternyata gagal mencapai tujuannya. Dengan meningkatnya berbagai kasus degradasi moral di kalangan pelajar—mulai dari perundungan, tawuran, hingga perilaku koruptif—penelitian ini menjadi sangat relevan untuk memberikan diagnosis yang akurat terhadap permasalahan fundamental pendidikan karakter di Indonesia. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis data statistik makro dari sumber-sumber terpercaya dengan teori manajemen perubahan organisasi dan sosiologi pendidikan kritis. Penelitian ini juga menggunakan data terkini periode 2024-2025 yang belum banyak diolah dalam literatur akademis.

Disparitas antara kebijakan yang luhur dan realitas yang buram ini menuntut adanya kajian akademis yang mendalam dan kritis. Penelitian ini hadir untuk tidak sekadar mengulang narasi normatif tentang pentingnya karakter, melainkan untuk membongkar akar masalah mengapa sekolah gagal menjalankan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai benang kusut tersebut dengan dua fokus utama: (1) Menyajikan deskripsi komprehensif mengenai bukti-bukti berbasis data statistik yang mengindikasikan kegagalan pendidikan karakter secara sistemik, dan (2) Menganalisis faktor determinan penyebab kegagalan tersebut dengan menggunakan pisau analisis manajemen pendidikan dan sosiologi pendidikan kritis.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) atau riset kepustakaan. Pemilihan metode ini didasarkan pada urgensi dan tujuan penelitian untuk mengeksplorasi fenomena makro pendidikan karakter yang bersifat multidimensi dan struktural, yang tidak dapat ditangkap secara komprehensif hanya melalui satu lokasi penelitian lapangan (field research) yang terbatas secara geografis. Mengacu pada perspektif Zed (2008), studi kepustakaan dalam konteks ini bukan sekadar aktivitas pasif membaca dan mencatat literatur, melainkan serangkaian kegiatan sistematis yang melibatkan metodologi pengumpulan data pustaka yang ketat, proses seleksi dan kritik sumber (kritik eksternal dan internal), serta sintesis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara mendalam. Peneliti memposisikan teks, baik berupa laporan statistik, dokumen kebijakan, maupun artikel ilmiah, bukan sekadar sebagai bahan bacaan pelengkap, melainkan sebagai subjek kajian utama yang merepresentasikan realitas objektif pendidikan nasional.

Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahapan heuristik yang ketat dan terstruktur untuk memastikan validitas serta reliabilitas informasi yang diperoleh. Peneliti menerapkan

strategi pencarian literatur (search strategy) yang sistematis menggunakan basis data akademik bereputasi global dan nasional seperti Scopus, Google Scholar, dan Portal Garuda, serta mengakses repositori resmi lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Kata kunci (keywords) yang digunakan dalam penelusuran meliputi kombinasi sintaksis: "Evaluasi Pendidikan Karakter", "Kegagalan Pendidikan Moral", "Kekerasan di Sekolah", "Indeks Integritas Pendidikan", "Profil Pelajar Pancasila", dan "Character Education Failure in Indonesia".

Untuk menjaga relevansi dan kemutakhiran data, peneliti menetapkan kriteria inklusi sumber data yang dibatasi pada rentang waktu 5-10 tahun terakhir (2015–2025). Rentang waktu ini dipilih untuk menangkap dinamika kebijakan pendidikan terkini, mulai dari transisi Kurikulum 2013 hingga implementasi penuh Kurikulum Merdeka. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama:

1. **Data Primer:** Merupakan dokumen resmi yang memuat statistik, data numerik, dan hasil evaluasi berskala nasional maupun internasional yang memiliki otoritas tinggi. Sumber ini meliputi Laporan Programme for International Student Assessment (PISA) yang diterbitkan oleh OECD (2019, 2024), Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait kasus anak, Rata-rata Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2023; 2024), serta data Rapor Pendidikan Indonesia yang dipublikasikan oleh Kemendikbudristek (2023).
2. **Data Sekunder:** Terdiri dari artikel jurnal ilmiah terakreditasi (Sinta 1–3) dan buku referensi otoritatif yang membahas kerangka teoretis manajemen pendidikan, sosiologi pendidikan, dan psikologi perkembangan. Data sekunder ini berfungsi sebagai pisau analisis teoretis untuk membedah, menginterpretasi, dan memberikan makna pada data statistik primer.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) model Krippendorff, yang memungkinkan peneliti untuk membuat inferensi yang valid dan replikabel dari teks ke dalam konteks penggunaannya. Selain itu, untuk memperkuat ketajaman analisis, peneliti mengadopsi model analisis interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan siklusal:

1. **Kondensasi Data (Data Condensation):** Peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang ada dalam catatan lapangan atau dokumen. Fokus utama diarahkan pada indikator-indikator "kegagalan", "hambatan", dan "disparitas". Data yang menunjukkan keberhasilan parsial tetap dicatat sebagai pembanding (counter-evidence), namun analisis utama difokuskan pada kesenjangan (gap) antara ekspektasi kebijakan dan realitas lapangan.
2. **Penyajian Data (Data Display):** Data statistik yang kompleks dan temuan kualitatif disusun secara naratif, logis, dan sistematis untuk memetakan pola-pola kegagalan yang berulang. Misalnya, peneliti mengorelasikan data beban administrasi guru dengan tren kenaikan kasus kekerasan di sekolah untuk melihat hubungan kausalitasnya.
3. **Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification):** Peneliti melakukan sintesis akhir untuk merumuskan proposisi mengenai penyebab fundamental kegagalan pendidikan karakter. Validitas temuan diuji melalui mekanisme triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang dirilis pemerintah (yang cenderung normatif/positif) dengan

data pembandingan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti FSGI atau Transparency International (yang cenderung kritis dan riil) untuk mendapatkan gambaran objektif yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan paparan komprehensif mengenai sintesis bukti empiris yang mengindikasikan kegagalan pendidikan karakter di Indonesia, dilanjutkan dengan diskusi mendalam mengenai dekonstruksi akar penyebab kegagalan tersebut melalui lensa manajemen pendidikan dan sosiologi kritis.

A. Anomali Pendidikan Karakter: Bukti Empiris Kegagalan Sistemik

Berdasarkan penelusuran dan analisis data primer periode 2024–2025, penelitian ini menemukan fakta paradoksal yang meresahkan: semakin masif jargon pendidikan karakter didengungkan melalui kampanye Profil Pelajar Pancasila, semakin tinggi pula indikator degradasi moral yang terukur secara statistik. Kegagalan ini terbukti tidak bersifat kasuistik atau oknum semata, melainkan telah menjadi fenomena sistemik yang terekam dalam tiga dimensi indikator utama: eskalasi kekerasan, defisit integritas publik, dan stagnasi karakter intelektual.

1. Eskalasi Kekerasan Ekstrem di "Zona Aman" Sekolah

Indikator paling mencolok dari kegagalan pendidikan karakter adalah transformasi sekolah dari ruang belajar menjadi arena kekerasan. Data terbaru dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI, 2025) menunjukkan tren eskalasi yang sangat mengkhawatirkan. Sepanjang periode tahun 2025, tercatat lonjakan kasus kekerasan berat di satuan pendidikan meningkat hampir 400% jika dibandingkan dengan data dua tahun sebelumnya (FSGI, 2023). Lonjakan drastis ini menjadi bukti empiris tak terbantahkan bahwa mekanisme pencegahan dan pendidikan karakter di sekolah sedang mengalami kelumpuhan fungsional.

Analisis tipologi kekerasan menunjukkan dominasi kekerasan fisik yang mencapai 50% dari total kasus, diikuti oleh kekerasan seksual sebesar 28,33%. Ironisnya, mayoritas pelaku dan korban berada dalam satu lingkungan sekolah yang sama, mengindikasikan gagalnya sekolah membangun iklim persaudaraan. Data ini diperkuat oleh laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebutkan bahwa persentase kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan masih sangat tinggi. Lebih tragis lagi, fenomena bunuh diri anak juga mencatat angka signifikan, di mana sebagian besar kasus terjadi saat anak masih mengenakan seragam sekolah atau berada di lingkungan sekolah (KPAI, 2024). Fakta ini menegaskan bahwa sekolah gagal menjadi inkubator moralitas dan gagal memberikan perlindungan psikososial bagi peserta didik.

2. Defisit Integritas dan Reproduksi Budaya Koruptif

Kegagalan internalisasi nilai kejujuran sebagai pondasi utama karakter tercermin secara nyata pada data makro Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Meskipun angka indeks menunjukkan stabilitas moderat, tren penurunan yang terjadi pada dimensi pengalaman publik (praktik suap menyuap skala kecil) menunjukkan bahwa pendidikan formal gagal memutus mata rantai budaya koruptif (BPS, 2024). Generasi muda yang dididik dengan kurikulum berkarakter ternyata tidak serta-merta tumbuh menjadi generasi yang resisten terhadap perilaku suap, gratifikasi, dan ketidakjujuran akademik. Hal ini

berkorelasi linear dengan stagnasi skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia yang menempatkan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga, yang menegaskan bahwa output sistem pendidikan nasional belum mampu melahirkan birokrasi dan masyarakat sipil yang bersih dan berintegritas.

3. Ketertinggalan Karakter Intelektual (Critical & Creative Thinking)

Pendidikan karakter dalam paradigma modern tidak hanya soal etika, tetapi juga karakter kinerja (performance character) seperti berpikir kritis dan kreatif. Namun, Laporan PISA 2022 Volume III yang dirilis pada tahun 2024 menampakkan rendahnya kualitas nalar siswa Indonesia (OECD, 2024). Pada domain Creative Thinking, siswa Indonesia hanya mampu meraih skor rata-rata yang sangat jauh tertinggal dibandingkan rata-rata negara OECD. Data rinci menunjukkan bahwa mayoritas siswa Indonesia tidak memiliki kemampuan dasar untuk berpikir kreatif, mengevaluasi gagasan, atau memecahkan masalah sosial sederhana. Temuan ini membuktikan bahwa dimensi "Bernalar Kritis" dan "Kreatif" dalam Profil Pelajar Pancasila masih sebatas wacana administratif di atas kertas dan belum terinternalisasi menjadi kompetensi kognitif yang nyata dalam diri siswa.

B. Dekonstruksi Penyebab: Mengapa Sekolah Gagal?

Analisis mendalam dan triangulasi data di atas dengan kajian literatur mengerucut pada kesimpulan bahwa kegagalan ini adalah akibat dari kesalahan desain manajemen pendidikan (mismanagement) pada level makro dan mikro.

1. Hegemoni Kognitif dan Evaluasi yang Mereduksi Manusia

Akar masalah struktural yang paling fundamental terletak pada sistem evaluasi pendidikan yang masih sangat positivistik. Meskipun Ujian Nasional telah dihapus, pola pikir "testing culture" masih mencengkeram kuat birokrasi pendidikan. Ramadhani dan Ihsan (2025) menegaskan bahwa evaluasi pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia masih didominasi secara mutlak oleh aspek kognitif, sementara aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan) sering kali diabaikan. Sekolah dan dinas pendidikan masih menjadikan nilai akademik dan capaian kognitif sebagai indikator tunggal keberhasilan (KPI). Resya (2023) menambahkan bahwa instrumen penilaian yang digunakan guru tidak mampu memotret perkembangan karakter siswa secara autentik. Akibatnya, pendidikan karakter mengalami marginalisasi sistematis; ia hanya diajarkan sebagai pengetahuan (moral knowing), bukan sebagai pembiasaan (moral acting). Kondisi ini melahirkan fenomena split personality: siswa bersikap santun di depan guru demi nilai sikap di rapor, namun tak berintegritas dan miskin etika di lingkungan atau media sosial.

2. Krisis Keteladanan: Guru dalam Belenggu Administratif

Dalam manajemen sumber daya manusia di sekolah, peran guru adalah sebagai role model utama. Namun, riset menunjukkan bahwa kapasitas guru untuk menjadi teladan telah tergerus oleh beban administratif yang tidak manusiawi. Prihatien, Amin, dan Hadi (2023) mengungkapkan bahwa implementasi kurikulum baru sering kali disertai dengan tuntutan administrasi yang masif yang menyita waktu guru. Studi Rosyada dkk. (2024) menunjukkan korelasi kuat antara burnout (kelelahan mental) guru akibat beban administrasi dengan penurunan kualitas interaksi pedagogis di kelas. Guru yang kelelahan secara administratif kehilangan sensitivitas emosional untuk mendeteksi bibit-bibit perundungan atau masalah psikologis siswa. Ketiadaan kehadiran guru secara psikologis (teacher presence) di ruang-ruang

informal sekolah memberi ruang kosong yang segera diisi oleh tumbuhnya hidden curriculum negatif berupa geng sekolah dan budaya kekerasan (Winarto, 2023).

3. Disrupsi Ekologi Pendidikan dan Inkonsistensi Nilai

Kegagalan sekolah juga diperparah oleh runtuhnya sinergi dalam Tri Pusat Pendidikan. Sekolah seolah berjuang sendirian melawan arus deras budaya digital dan realitas sosial yang destruktif. Aprilliawati dan Budimansyah (2021) menyoroti bahwa faktor penghambat terbesar adalah lingkungan yang tidak kondusif. Nilai toleransi dan kesopanan yang diajarkan guru PPKn selama di kelas runtuh seketika saat siswa mengakses konten ujaran kebencian (hate speech) di media sosial. Terjadi ketidaksinkronan nilai yang tajam antara narasi sekolah (yang idealis) dengan realitas masyarakat (yang pragmatis, transaksional, dan terkadang koruptif). Selain itu, Salirawati (2021) mengidentifikasi adanya parental disengagement, di mana orang tua menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan karakter kepada sekolah. Tanpa dukungan pola asuh orang tua yang selaras dan kontrol sosial masyarakat yang kuat, pendidikan karakter di sekolah hanyalah benteng rapuh yang mudah jebol oleh realitas zaman.

4. Metodologi Pembelajaran yang Indoktrinatif

Secara pedagogis, metode pengajaran nilai di Indonesia masih terjebak pada pendekatan indoktrinasi satu arah (top-down). Suherman dkk. (2023) menemukan bahwa integrasi nilai karakter sering kali gagal karena guru lebih fokus pada target materi kurikulum. Pendidikan karakter sering kali disampaikan melalui metode ceramah yang membosankan (transfer of knowledge), bukan melalui dialog kritis (moral reasoning) atau proyek sosial nyata. Selain itu, terjadi kegagalan integrasi kurikulum secara holistik; beban pendidikan karakter sering kali hanya ditumpukan pada guru Agama dan PPKn, sementara guru mata pelajaran lain (Matematika, IPA) merasa tidak memiliki kewajiban moral untuk mengajarkan karakter (Filiansi dkk., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap bukti empiris dan sintesis kajian pustaka, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan karakter di sekolah-sekolah Indonesia saat ini sedang mengalami fase kegagalan fungsional dan belum berhasil mencapai tujuan ideal undang-undang. Kegagalan ini terkonfirmasi secara kuantitatif dan kualitatif melalui stagnasi skor PISA pada domain iklim sekolah, lonjakan drastis angka kekerasan anak berdasarkan data KPAI dan FSGI, serta stagnasi indeks integritas dan perilaku anti-korupsi. Penyebab kegagalan ini bukan bersifat tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari faktor struktural dan kultural yang saling berkelindan. Pertama, hegemoni sistem evaluasi pendidikan yang masih mendewakan aspek kognitif dan angka akademik menyebabkan pendidikan karakter tereduksi hanya menjadi formalitas administratif tanpa makna. Kedua, terjadinya krisis keteladanan di sekolah akibat beban kerja administratif guru yang berlebihan, yang mematikan peran guru sebagai pendidik dan role model. Ketiga, adanya disonansi dan ketidaksinkronan yang tajam antara nilai-nilai luhur yang diajarkan di sekolah dengan realitas budaya masyarakat dan ekosistem digital yang agresif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi total manajemen pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak boleh lagi diposisikan sekadar sebagai sisipan kurikulum atau hafalan materi, melainkan harus direkayasa ulang menjadi budaya organisasi (school culture) yang hidup. Evaluasi keberhasilan siswa harus bertransformasi dari basis tes tulis menjadi basis rekam jejak perilaku (track record) yang

otentik dan komprehensif. Selain itu, paradigma hubungan antara sekolah dan orang tua harus diubah dari sekadar relasi transaksional menjadi kolaborasi transformasional yang sinergis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilliawati, S., & Budimansyah, D. (2021). Tinjauan analisis kritis terhadap faktor penghambat pendidikan karakter di Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 5(4).
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Beer, M., & Nohria, N. (2000). Cracking the code of change. *Harvard Business Review*, 78(3), 133-141.
- Filiansi, M., dkk. (2024). Analisis peran guru dalam menerapkan pendidikan karakter kepada siswa. *Jurnal Pendidikan Indonesia (JPI) Universitas PGRI Yogyakarta*, 10(2).
- FSGI. (2023). Catatan akhir tahun pendidikan 2023: Darurat kekerasan di satuan pendidikan. Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia.
- FSGI. (2025). Laporan kekerasan di satuan pendidikan tahun 2025. Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia.
- Hadijaya, Y., Novita, W., & Yurdiana, E. (2025). Pendidikan sebagai proses transformasi kebudayaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 276–287.
- Hirsch, P. M., & Soucey, M. D. (2006). Organizational restructuring and its consequences: Rhetorical and structural. *Annual Review of Sociology*, 32, 171-189.
- Kemendikbudristek. (2023). Rapor pendidikan Indonesia 2023. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Muhammad, I., & Amril, M. (2024). Pendidikan sebagai Transformasi Budaya Serta Implikasinya dalam Pembelajaran PAI. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 10954–10961.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Novianti, Y. (2022). Peran Pendidikan Dalam Proses Pembudayaan Sebagai Transformasi Budaya Pada Era Milineal. *Jurnal Sintaksis*, 4(1), 11–17.
- OECD. (2019). *PISA 2018 Results (Volume III): What school life means for students' lives*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2024). *PISA 2022 Results (Volume III): Creative minds, creative schools*. Paris: OECD Publishing.
- Prihatien, Amin, & Hadi. (2023). Kurikulum merdeka: Dampak peningkatan beban administrasi guru terhadap efektivitas pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran (JIEPP)*, 4(3), 9236.
- Rahmawati, D. R. (2023). Kebudayaan dalam Pendidikan Era Society 5.0. *Journal of History Culture and Art Research*, 8(1), 111.
- Ramadhani, O. V., & Ihsan, Z. (2025). Dominasi penilaian aspek kognitif terabaikannya aspek afektif dan psikomotorik. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 11(2).
- Resya, K. N. P. (2023). Evaluasi pembelajaran dalam ranah aspek kognitif pada jenjang pendidikan dasar. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(2).
- Rosyada, dkk. (2024). Pengaruh beban administrasi kurikulum merdeka, tekanan waktu, dan dukungan organisasi terhadap kesejahteraan mental guru SMK. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan (JEKPEND)*, 8(1), 79.
- Salirawati, D. (2021). Pendidikan karakter sebagai landasan pembentukan generasi muda. *Jurnal Dewantara*, 11.

- Suherman, dkk. (2023). Integrasi nilai karakter dalam pembelajaran pada kurikulum sekolah. *Jurnal Pengabdian*, 6(2).
- Winarto. (2023). Pengaruh beban kerja dan administrasi terhadap kinerja guru dengan work-life balance. *Jurnal Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(4).
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).